

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ag, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustang. 2017. *Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)*. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik, UIN Alauddin.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi revisi ke-2). Bandung: Alfabeta cv.
- Alfarid, A., Junior, C. T., & Ramadani, P. 2022. *Implikasi penetapan adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap politik hukum pemerintah Daerah Sumatra Barat*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776-794.
- Almond, Gabriel. 1978. *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*. Dalam Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrew, Eds. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Anderson, J. E. 1979. *Public Policy Making Holt*. New York: Rinehart and Winston.
- Arifin, Z. 2020. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. *Jurnal Al-Hikmah*.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2016. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dayanti, A. P. 2023. *DPRD Tanpa Perempuan: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019*. *Doctoral Dissertation* tidak untuk dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Dewantara, A. W. 2019. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia*. In *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)* (pp. 396-404).
- Di Mentawai, D. P. *Kepercayaan Tradisional "Arat Sabulungan"*. Cacat Yuridis dalam Prosedur sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara 1-9, 50.

- Dunn, W. N. 1994. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Endri, Y. 2021. *Minangkabau Dalam Lintas Sejarah*. Bunga Rampai Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2).
- Fauzi, R. R. 2023. *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Tasikmalaya Tahun 2022*. *Doctoral Dissertation* tidak untuk diterbitkan. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Habibah, S. M. 2021. *Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2), 221-230.
- Helna, H. 2020. *Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam*. *Doctoral Dissertation* tidak untuk diterbitkan, Batam: Prodi Administrasi Negara.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. 2009. *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystems*. Toronto: Oxford university press.
- Islam, E. M. D., Bekti, H., & Muhafidin, D. 2022. "Formulasi Kebijakan Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Aceh". *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1) : 197-213)
- Islamy, I. M. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka,.
- Iswadi, M. P., Karnati, N., Ahmad Andry, B., & Adab, P. 2023. *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab.
- Mifta Farid, Antikowati, & Rosita Indrayati. 2017. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. *E-Journal Lentera Hukum, University of Jember, Volume 4, Issue 2*.
- Mochtar, Z. A. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Muhammad, I. S. 2020. *Sikap Masyarakat Terhadap Wacana Pembentukan Sumatera Barat Menjadi Daerah Istimewa Minangkabau*. *Doctoral dissertation* tidak untuk diterbitkan. Padang: Universitas Andalas.
- Muhammad, I. S. 2020. *Sikap Masyarakat Terhadap Wacana Pembentukan Sumatera Barat Menjadi Daerah Istimewa Minangkabau*. *Doctoral dissertation*, tidak untuk dipublikasikan. Universitas Andalas.

- Muhlis Madani. 2010. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana, D. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S., 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Nugroho, R. 2023. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo
- Prasetyo, Bambang & Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: PT Rajagrafindo Persada.
- Rizky, R., & Wibisono, T. 2012. *Mengenal Seni Dan Budaya Indonesia*. Cerdas Interaktif.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihanto, A. 2023. *Optimalisasi Keterlibatan Civil Society dalam Penyusunan Perundang-undangan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), 98-107.
- Syamsuddin, A. 2012. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Tangkilisan, H. N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- William, N. D. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Buku Kita.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Witianti, S., IP, S., Solihah, R., & IP, S. 2018. *Faktor Kegagalan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif Di Indonesia*. In *Open Society Conference, Social and Political Challenges in Industrial Revolution* (Vol. 4, pp. 635-649).
- Zulfadli. *Rekognisi Dan Kesetaraan Kewarganegaraan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas.

Web:

BBC News Indonesia. Undang-Undang baru Sumatera Barat dan tuduhan diskriminasi 'yang menyakitkan' terhadap suku Mentawai. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyx5kjre9dqq>. Diakses pada 15 Mei 2023, pukul 15.13 WIB

DPR RI Bahas RUU Sumbar, Singgung Soal Daerah Istimewa Minangkabau, <https://langgam.id/dpr-ri-bahas-ruu-sumbar-singgung-soal-daerah-istimewa-minangkabau/>, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 10.45 WIB

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB - Nasional Tempo.co, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 19.25 WIB

DPR Tegaskan Pengesahan RUU Lima Provinsi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/503430/dpr-tegaskan-pengesahan-ruu-lima-provinsi-untuk-percepatan-pembangunan-daerah>, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 19.39 WIB

Jokowi Teken UU Nomor 17/2022, Atur Falsafah Syariat Islam di Sumatera Barat, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/14480311/jokowi-teken-uu-nomor-17-2022-atur-falsafah-syariat-islam-di-sumatera-barat>, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 12.49 WIB

Kebudayaan Sumatra Barat (Sumbarprov.go.id), diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 3.41 WIB

Nilai Toleransi Tiga Kota Sumbar Dinilai Rendah, Ini Alasannya, <https://katasumbar.com/nilai-toleransi-tiga-kota-di-sumbar-dinilai-rendah-ini-alasannya/>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 3.52 WIB

Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bpk.go.id/peta-situs/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 14.10 WIB

RUU Sumatera Barat Disahkan Menjadi Undang-Undang, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/514541/ruu-sumatera-barat-disahkan-menjadi-undang-undang>, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 19.09 WIB

Sejarah Kepulauan Mentawai, <http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/>, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 16.42 WIB.